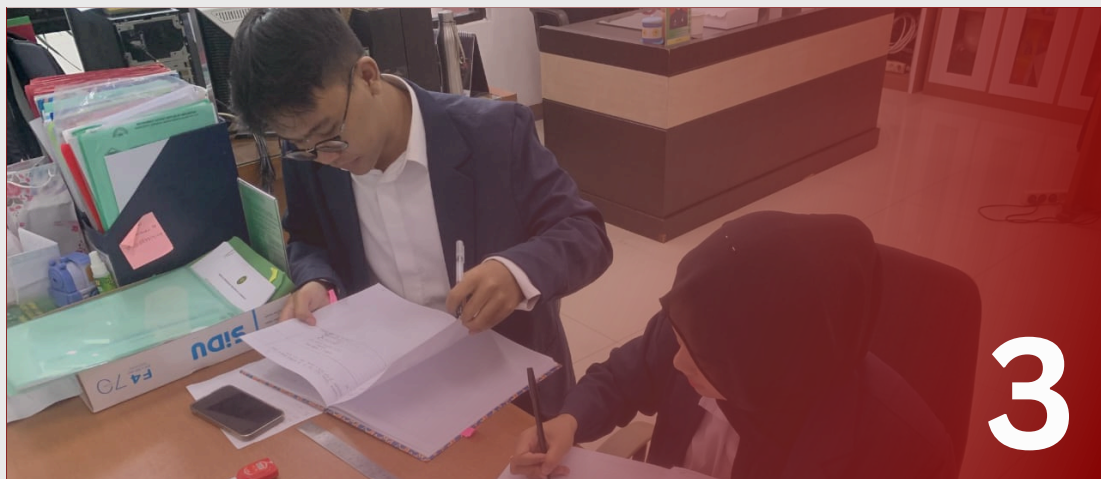


# MAJALAH

**MAGANG MANDIRI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2026**



# DAFTAR ISI



SEJARAH

1

KEPANITERAAN

4

PTSP

2

PERSIDANGAN

5

KESEKRETARIATAN

3



4



5

OUR TEAM



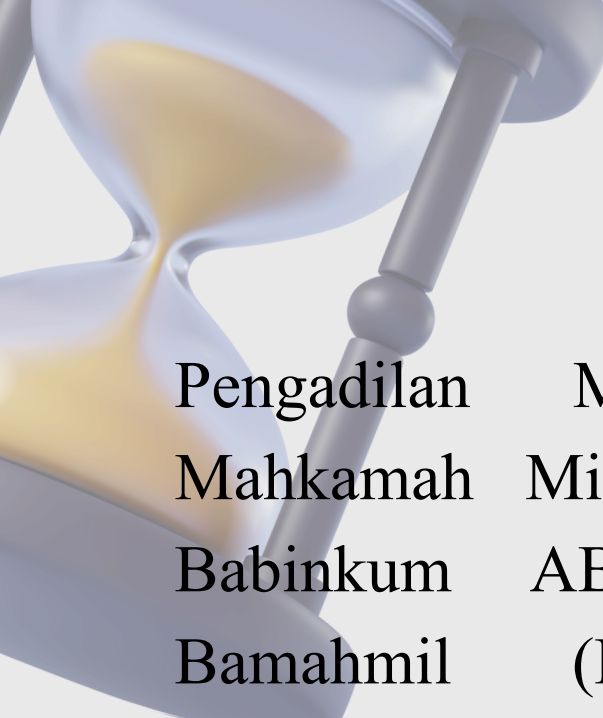
FARIZ ANGEL RICKY  
FARIZ ANGEL RICKY



YUSUF YAODAN MIRA DAFFA  
YUSUF YAODAN MIRA DAFFA

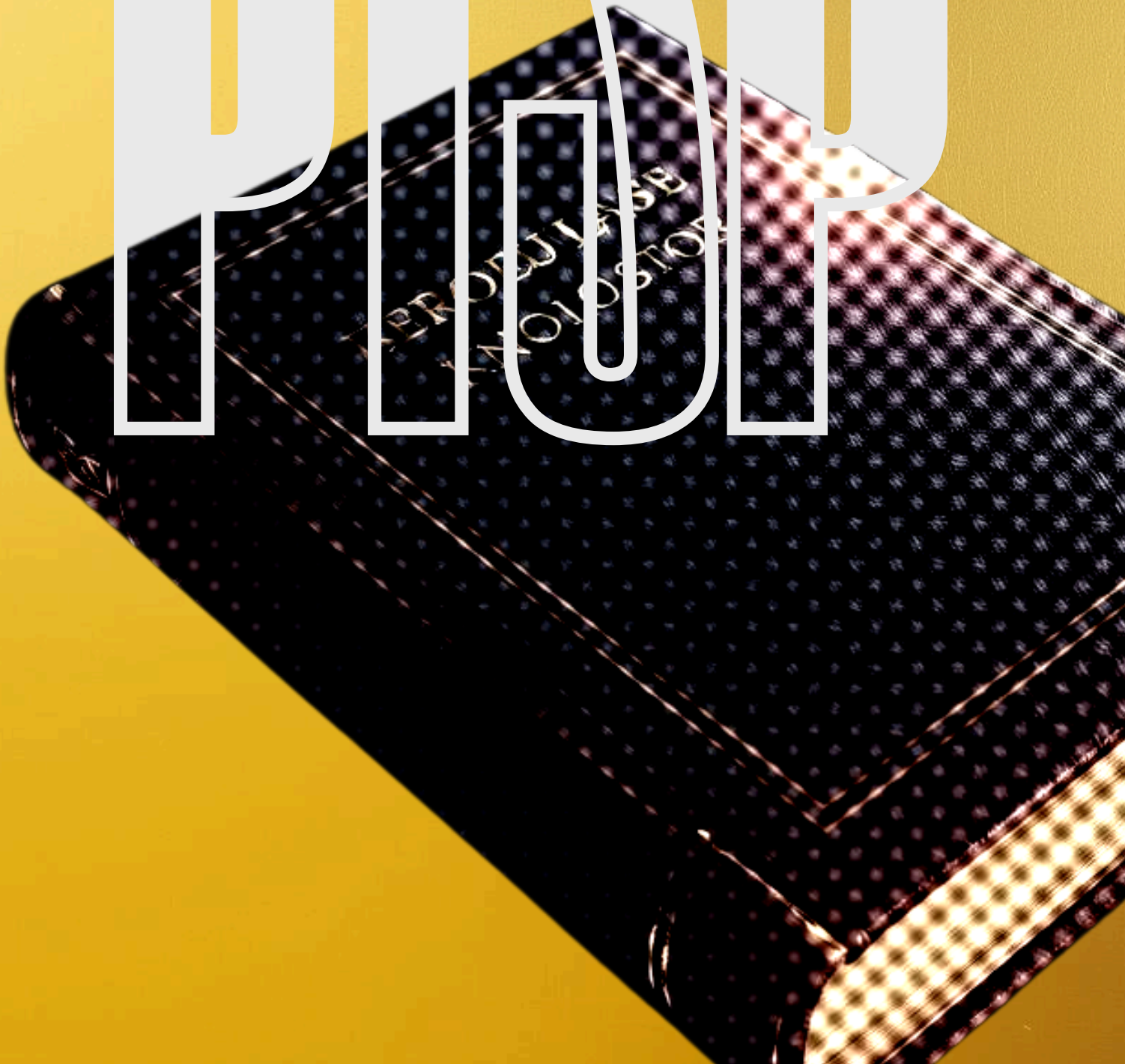
# SEJARAH





Pengadilan Militer awalnya bernama Mahkamah Militer dan berada di bawah Babinkum ABRI sebagai bagian dari Bamahmil (Keputusan Pangab No. KEP/01/P/1/1984). Mahkamah Militer bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana di lingkungan ABRI. Sejak Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2004, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Militer dialihkan ke Mahkamah Agung RI secara bertahap. Nama berubah menjadi Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Dilmil III-12 Surabaya). Kini, Dilmil III-12 Surabaya sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung RI, memiliki gedung dan inventaris sendiri, serta aktif mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

# PROSPERITY

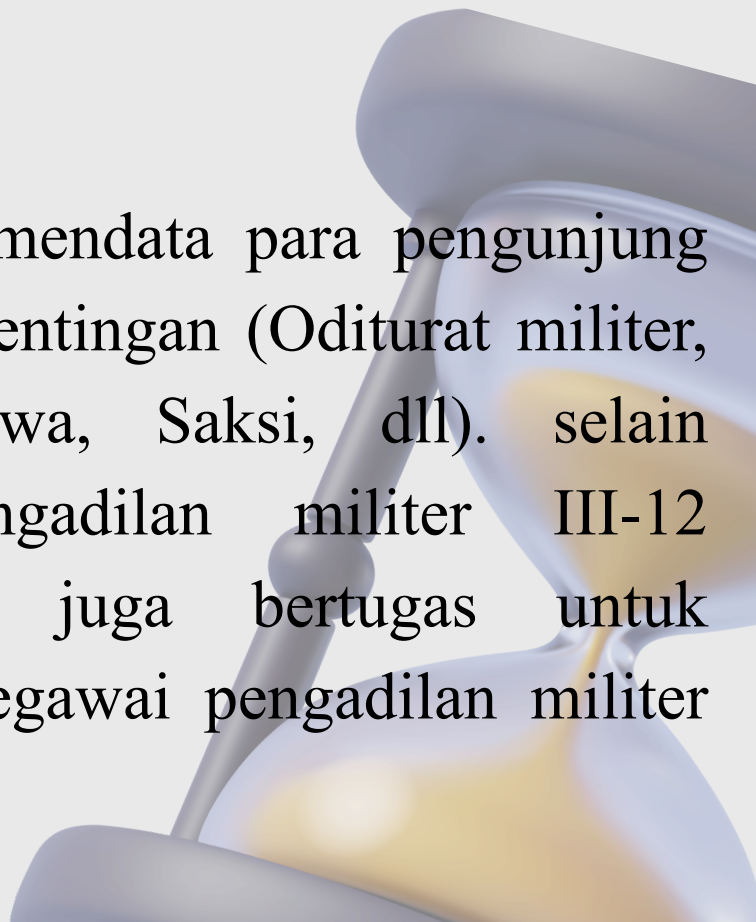


Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP bertujuan untuk menciptakan layanan yang cepat, mudah, transparan dan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta memberikan layanan yang prima, akuntabel, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. PTSP memiliki prinsip sebagai berikut, diantaranya :

- a. Keterpaduan
- b. Efektif, Efisien dan Ekonomis
- c. Koordinasi
- d. Akuntabilitas

## Meja Piket

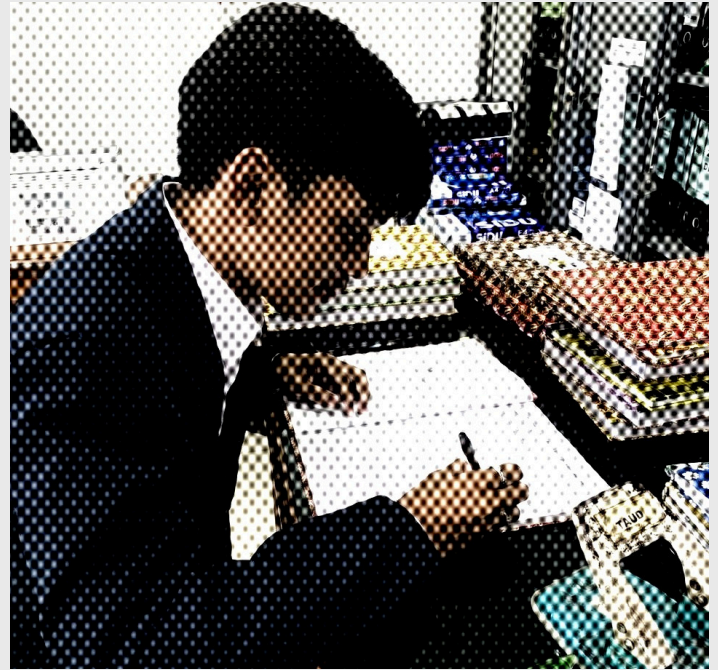
meja piket bertugas untuk mendata para pengunjung dan para pihak yang berkepentingan (Oditurat militer, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, dll). selain mendata pengunjung pengadilan militer III-12 Surabaya, Petugas piket juga bertugas untuk menyiapkan absen setiap pegawai pengadilan militer III-12 Surabaya.



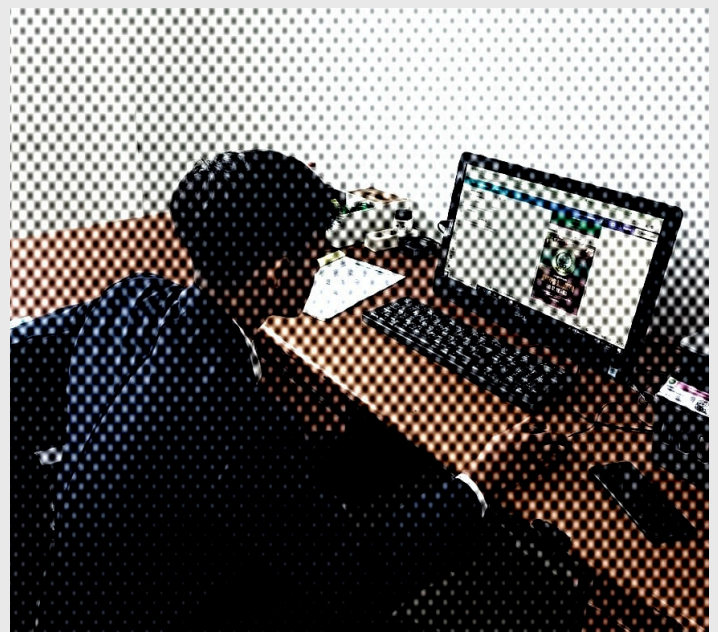
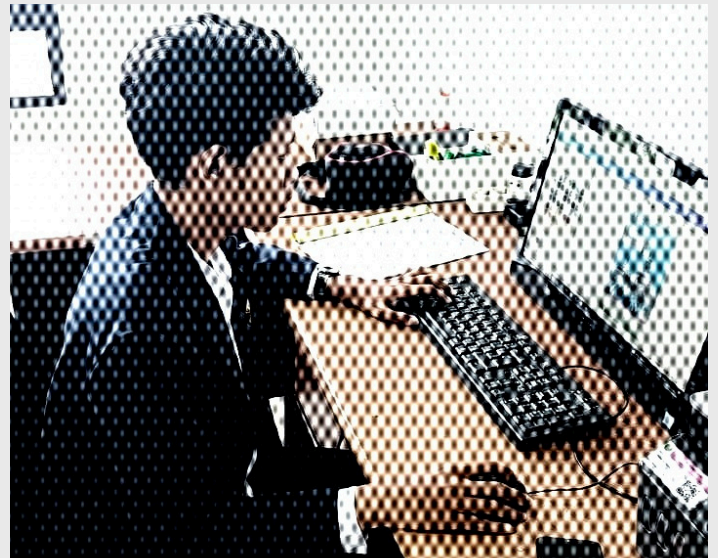
# KESEMPATAN



Selama magang pada 5-8 Maret di bagian Kesekretariatan, kami melakukan berbagai kegiatan di sub-bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, termasuk membantu memperbaiki surat perjanjian kerja dengan menyesuaikan nama pejabat yang berwenang sesuai perubahan struktur organisasi. Kami juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan Bapak Ainur Rofiq, S.E., M.Ak. mengenai PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dasar hukum, tujuan pembentukan, dan penerapannya dalam lingkungan peradilan militer.



Di sub-bagian Umum dan Keuangan, kami mempelajari tata cara pembuatan penutup buku surat masuk dan keluar serta melakukan pencatatan surat keluar secara manual untuk memastikan pengelolaan arsip yang tertib dan sistematis. Sementara itu, di sub-bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) di bawah pimpinan Ibu Melani Puspara, S.E., kami berkontribusi merancang poster untuk memperingati hari-hari besar seperti Hari Dharma Samudera, Supersemar, dan Hari Kostrad, dengan tujuan meningkatkan penyebaran informasi dan memperkuat nilai-nilai sejarah melalui media visual yang menarik.



# KEPANTERAAN



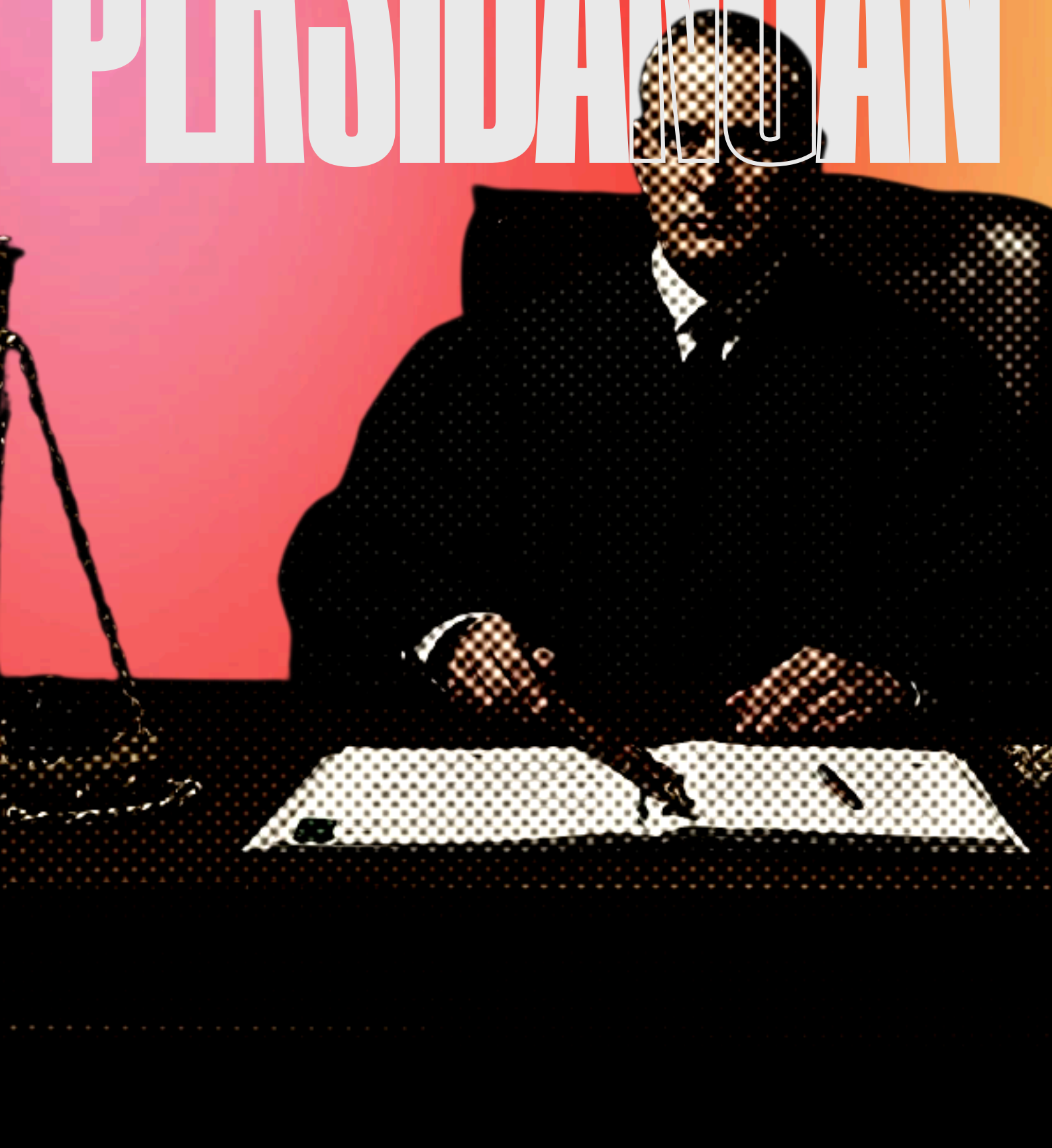
Di balik ketegasan palu hakim Pengadilan Militer, terdapat peran vital jajaran Kepaniteraan yang bekerja tak kenal lelah sebagai motor penggerak administrasi peradilan. Dipimpin oleh seorang Panitera yang bertanggung jawab penuh mengoordinasikan seluruh administrasi perkara hingga pelaksanaan eksekusi putusan, tim ini terbagi menjadi beberapa lini tugas yang spesifik.



Roda administrasi berputar mulai dari Panitera Muda Pidana yang bertugas sebagai pintu gerbang penerimaan berkas dari Oditur serta penyusun jadwal sidang, bersinergi dengan Panitera Muda Hukum yang fokus mengelola 'memori' pengadilan melalui pengarsipan berkas dan data statistik perkara. Di ruang sidang, peran ini diteruskan oleh Panitera Pengganti yang duduk berdampingan dengan Majelis Hakim, bertugas mencatat setiap detail fakta persidangan ke dalam Berita Acara untuk memastikan proses hukum militer berjalan transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan



# PERSIDANGAN





## **TAHUKAH KALIAN ?**

Persidangan pada Pengadilan Militer itu sebenarnya sama saja dengan Pengadilan pada umumnya namun subjek hukumnya saja yang berbeda yaitu sesuai namanya militer atau TNI. Dalam Persidangan Pengadilan Militer tetap ada Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2, Panitera, Penasihat hukum atau Pengacara, dan Oditur militer atau Jaksa, yang dimana semuanya merupakan anggota militer namun terkadang penasihat hukum boleh berasal dari orang sipil dengan syarat tertentu. Perlu diketahui Persidangan pada Pengadilan Militer itu juga terbuka dan boleh dilihat oleh orang umum dengan beberapa peraturan yang sangat ketat.



# RUANG SIDANG CAKRA



# COMMAND CENTER PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



# FAKULTAS HUKUM

# UNESSA

